



PENETAPAN

Nomor 0202/Pdt.P/2014/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Nawiri bin H. Abdullah, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Jurang Mangu Barat RT.002 RW. 001, Kelurahan Jurang Manggu Barat, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I";-----

Murtini binti Abdul Majid, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Jurang Mangu Barat RT.002 RW. 001, Kelurahan Jurang Manggu Barat, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II"; -----

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut Para Pemohon; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka persidangan ; -----

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 April 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0202/Pdt.P/2014/PA.Tgrs tanggal 19 Mei 2014 dengan alasan dan tambahan/perubahan dimuka sidang sebagai berikut: ----



1. Bahwa, pada 10 Januari 1977 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan; -----

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Murjeni bin Abd. Majid dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama H. Zaidih bin H. Maja dan H. Abdul Latief bin Tabroni, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) dibayar tunai ; -----

3. Bahwa, antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

4. Bahwa, setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama:
 - 4.1 Satibi, Laki-Laki, lahir tahun 1979 ;-----
 - 4.2. Saiful, Laki-Laki, lahir tahun 1980 ;-----
 - 4.3. Dede Mirwan, Laki-Laki, lahir tahun 1983 ;-----
 - 4.4. Nabila Ananda Putra, Laki-Laki, lahir tahun 1985 ;-----

5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam ; -----

6. Bahwa, sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah karena perkawinan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, oleh karenanya untuk alas hukum dalam mengurus Pasport haji dan kepentingan lainnya , diperlukan penetapan pengesahan nikah ; -----

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ; -----



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 10 Januari 1077 di hadapan/diwilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan;-----

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ; -----

Atau, Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya; -----

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya terdapat perubahan nama wali nikah seharusnya Murjeni bin Abdul Majid, kakak kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia dan kepentingan Isbath Nikah ini untuk mengurus Pasport ; -----

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa : -----

A. Surat – Surat :

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Nawiri H. Abdullah) Nomor 3674031412500005 dan atas nama Pemohon II (Murtini) yang dikeluarkan Camat Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai secukupnya, selanjutnya disebut P.1; -----
2. Potokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (Nawiri H. Abdullah) Nomor 3674030403100025 yang dikeluarkan Camat Kecamatan



Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai secukupnya, selanjutnya disebut P.2; -----

B. Saksi – Saksi :

1. H. Zaidih bin H. Maja. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II ; -----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri dan saksi menghadiri pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 1977 di rumah Pemohon II; -----
- Bahwa sewaktu menikah status Pemohon I jejak sedangkan Pemohon II Perawan ; -----
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Murjeni karena ayahnya yang bernama Abdul Majid sudah meninggal dunia ; -----
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah H. Abdul Latief bin Tabroni dan saya sendiri ; -----
- Bahwa yang menjadi maskawinnya adalah uang sebesar Rp.100,- (seratus rupiah) dibayar tunai ; -----
- Bahwa yang mengucapkan Ijab adalah kakak kandung Pemohon II sedang Qabul diucapkan oleh Pemohon I ; -----
- Bahwa setahu saksi, antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda, sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun perundang-undangan lainnya;
- Bahwa setahu saksi dari pernikahannya, para Pemohon sudah dikaruniai 4 orang anak; -----
- Bahwa menurut para Pemohon, sejak menikah hingga diajukan permohonan ini mereka tidak pernah bercerai, masih beragama Islam dan tidak ada pihak ketiga yang menyatakan bahwa mereka bukan pasangan suami isteri ; -----

Disclaimer



- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sehingga sampai saat ini mereka tidak pernah memiliki Buku Nikah ; -----
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus Pasport dan kepentingan lainnya; -----

2. H. Abdul Latief bin Tabroni. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi sebagai kakak ipar Pemohon I dan kenal dengan Pemohon II; -----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri dan saksi menghadiri pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 1977 di rumah Pemohon II; -----
- Bahwa sewaktu menikah status Pemohon I jejak sedangkan Pemohon II Perawan ; -----
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Murjeni karena ayahnya yang bernama Abdul Majid sudah meninggal dunia ; -----
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah H. Zaidih bin H. Maja dan saya sendiri ; -----
- Bahwa yang menjadi maskawinya adalah uang sebesar Rp.100,- (seratus rupiah) dibayar tunai ; -----
- Bahwa yang mengucapkan Ijab adalah kakak kandung Pemohon II sedang Qabul diucapkan oleh Pemohon I ; -----
- Bahwa setahu saksi, antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda, sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun perundang-undangan lainnya;
- Bahwa setahu saksi dari pernikahannya, para Pemohon sudah dikaruniai 4 orang anak; -----
- Bahwa menurut para Pemohon, sejak menikah hingga diajukan permohonan ini mereka belum pernah bercerai, masih beragama



Islam dan tidak ada pihak ketiga yang menyatakan bahwa mereka bukan pasangan suami isteri ; -----

- Bahwa sejak menikah hingga diajukan permohonan ini mereka belum pernah bercerai dan tidak ada pihak ketiga yang menyatakan bahwa mereka bukan pasangan suami isteri ; -----
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sehingga sampai saat ini mereka tidak pernah memiliki Buku Nikah ; -----
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus Pasport dan kepentingan lainnya; -----

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Bahwa bukti surat P.1 berupa Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, hanya menunjukkan sebagai bukti bahwa para Pemohon sebagai penduduk Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, yang juga merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, bukan sebagai bukti pernikahan ; -----

Bahwa permohonan ltsbat Nikah para Pemohon tentang pengesahan nikah meskipun terjadi sesudah Tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak dibenarkan, namun karena para Pemohon bermaksud mengurus Pasport .sehingga diperlukan adanya penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan (3)



butir (e) Kompilasi Hukum Islam, maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan ; -----

Bahwa dalam permohonan Pemohon dimaksud, Pemohon I berkedudukan sebagai suami dari Pemohon II, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I a quo merupakan subjek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat Kompilasi Hukum Islam ; ----

Bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon yang diperkuat dengan keterangan dua orang saksi bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Januari 1977 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan menurut tata cara Agama Islam dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Murjeni bin Abdul Majid dengan disaksikan 2 orang saksi nikah bernama H. Zaidih bin H. Maja dan H. Abd. Latief bin Tabroni, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) dibayar tunai, akan tetapi yang bersangkutan tidak mempunyai Kutipa Akta Nikah sekalipun pernikahannya tersebut telah memenuhi rukun dan syarat-syarat pernikahan ; -----

Bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Potokopi Kartu Keluarga serta bersesuaian dengan posita permohonan para Pemohon serta dikuatkan keterangan dua orang saksi, yang pada pokoknya menyatakan, bahwa pekawinan para Pemohon telah berlangsung di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan pada tanggal 10 Januari 1977 dengan tata cara agama Islam, ada calon suami (Pemohon I) dan calon isteri (Pemohon II), ada wali nikah yang sah, serta disaksikan oleh dua orang saksi nikah dan dengan terjadinya *ijab qobul*, maka Majelis Hakim memandang rukun perkawinan telah terpenuhi, sebagai dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan 29 Kompilasi Hukum Islam, maka dalil tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alasan pengesahan nikah ; ---

Bahwa berdasarkan kesaksian kedua saksi tersebut, terdapat keterangan bahwa dalam perkawinan tersebut, tidak terdapat larangan perkawinan sebagai disebutkan dalam *al-Qur'an* surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram di nikahi yaitu : -----



حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” An-Nisaa ayat 23).; -----

Bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta tidak terdapat larangan untuk melakukan perkawinan menurut Hukum Islam, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan pada tanggal 10 Januari 1977 tersebut dapat dinyatakan sah menurut hukum, sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ; -----

Bahwa tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon tersebut sebagai dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak menyebabkan perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan bukan pula merupakan perlawanan terhadap ketentuan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 namun karena ketidaktahuan para Pemohon akan pentingnya pencatatan perkawinan; -----



Bahwa untuk memenuhi Pasal 2 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam Jo Pasal 34 dan 35 Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Undang Undang Kependudukan, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pengesahan nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat pernikahannya dilaksanakan atau tempat tinggal para Pemohon; -----

Bahwa dengan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, maka telah dapat dijadikan bukti pernikahan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dipergunakan sebagai bukti yang berkaitan dengan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan kepentingan lainnya yang berhubungan dengan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;-----

Bahwa perkara ini sifatnya *voluntaire (ex-parte)*, seluruh kepentingan ada pada para Pemohon sehingga biaya perkara seluruhnya dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum penetapan di bawah ini ; -----

Memperhatikan pasal-pasal perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini, maka majelis hakim menjatuhkan diktum penetapan sebagai berikut : -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ; -----
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Nawiri bin H. Abdullah) dengan Pemohon II (Murtini binti Abdul Majid) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Januari 1977, di Wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan; -----
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 341.000.- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2014 Masehi bertepatan tanggal 1 Sya'ban 1435 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Ai Jamilah, M.H., sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Sitti Hajar, S.HI., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para Pemohon ;

H a k i m,

Dra. Hj. Ai Jamilah, M.H.

Panitera Pengganti,

Sitti Hajar, S.HI

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Kepaniteraan Rp. 30.000,-
- Biaya Proses Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan Rp. 250.000,-
- Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
- Biaya Materai Rp. 6.000,-
- J u m l a h Rp. 341.000,-
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)